

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Gelombang demokratisasi di dunia ini bagaikan roda. Roda demokratisasi terus berputar. Gelombang panjang demokratisasi pertama terjadi pada tahun 1828-1926, diikuti oleh gelombang balik pertama tahun 1922-1942, selanjutnya terjadi lagi gelombang pendek demokratisasi kedua tahun 1943-1962, tahun 1958-1975 terjadi lagi gelombang balik kedua, dan tahun 1974-1990 terjadi lagi gelombang demokratisasi ketiga. Sekitar 20 tahun setelahnya, terjadi lagi gelombang demokratisasi. Dinamika gelombang tersebut terjadi di kawasan yang berbeda-beda. Eropa, Amerika Latin, Asia sampai Afrika sudah pernah terkena gelombang tersebut.

Tahun 1990-an di Eropa Timur terjadi peristiwa yang disebut Glasnost. Peristiwa ini termasuk dalam gelombang demokratisasi ketiga yang menyebabkan runtuhnya Uni Soviet dan munculnya negara-negara baru yang menganut demokrasi.

Sedangkan 20 tahun kemudian terjadi hal yang serupa di belahan dunia lainnya, yaitu di kawasan Timur Tengah. Terjadi pemberontakan besar-besaran di negara-negara di kawasan Timur Tengah. Sudah menjadi hal yang biasa, jika membicarakan tentang Timur Tengah tidak jauh dari konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Tetapi dalam dua tahun belakangan ini, sekitar akhir 2010, perhatian dunia terhadap Dunia Islam di Timur Tengah tidak lagi terpusat pada konflik Israel dan Palestina. Perhatian dunia berpindah

ke negara-negara Arab yang mengalami pergolakan di dalam negeri. Pergolakan ini tidak hanya terjadi di salah satu negara Arab, pergolakan ini menyebar ke negara-negara lain di sekitarnya. Dimulai dari Tunisia, Aljazair, Mesir, Libya dan saat ini yang masih panas adalah pergolakan di Suriah. Pergolakan ini dinamakan Arab Spring atau sering disebut Musim Semi Arab, Kebangkitan Arab, Pergolakan Arab, dan sebagainya.

Dari kedua peristiwa gelombang demokratisasi ini, Glasnost dan Arab Spring, terdapat persamaan dan perbedaan yang menarik. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan tersebut, penulis tertarik dan lebih ingin mengetahui terhadap persoalan demokratisasi di Eropa Timur dan Timur Tengah, maka penulis akhirnya memilih judul “PERBANDINGAN DINAMIKA GELOMBANG DEMOKRATISASI GLASNOST (1990-AN) DAN ARAB SPRING (2010-AN)”

B. Latar Belakang Masalah

Sebuah gelombang demokratisasi adalah sekelompok transisi dari rezim-rezim nondemokratis ke rezim-rezim demokratis, yang terjadi di dalam kurun waktu tertentu dan jumlahnya secara signifikan lebih banyak daripada transisi menuju arah sebaliknya.¹

Menurut Samuel P. Huntington dalam buku *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, kurun waktu dari gelombang perubahan rezim-rezim tersebut dapat dibatasi sebagai berikut:

¹ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta, Grafiti Press, 2000, halaman 13

| | |
|---|-----------|
| Gelombang panjang demokratisasi pertama | 1828-1926 |
| Gelombang balik pertama | 1922-1942 |
| Gelombang pendek demokratisasi kedua | 1943-1962 |
| Gelombang balik kedua | 1958-1975 |
| Gelombang demokratisasi ketiga | 1974- |

Gelombang demokratisasi pertama tahun 1828 sampai 1926 diawali oleh Revolusi Perancis dan Revolusi Amerika. Tahun 1922 sampai 1942 terjadi gelombang balik pertama diawali dengan munculnya negara-negara fasis di Italia dan Jerman, kemudian menyebarkan kudeta militer di Portugal tahun 1926, Brasil dan Argentina tahun 1930, otoritarianisme di Uruguay tahun 1933, kudeta dan perang saudara di Spanyol tahun 1936.

Setelah itu terjadilah gelombang demokratisasi kedua pada tahun 1943 sampai 1962 yang diawali pendudukan tentara Sekutu pada Perang Dunia II dan setelah Perang Dunia II. Tidak hanya tahun 1922 sampai 1942 terjadi gelombang balik, tetapi pada tahun 1958 sampai 1975 gelombang balik terjadi lagi untuk kedua kalinya. Gelombang balik ini ditandai oleh naiknya rezim otoritarian di negara-negara Amerika Latin seperti Peru, Uruguay, Chile, Bolivia, Ekuador, Brasil, dan Argentina. Selain di Amerika Latin, gelombang balik ini terjadi di Asia (Pakistan, Korea, Indonesia, Filipina, India, Taiwan), di Eropa (Yunani, Turki) dan di Afrika hampir semua wilayah Afrika khususnya Nigeria pada tahun 1966 yang dikudeta oleh militer, kecuali Bostwana.

Tahun 1974 terjadi lagi gelombang demokratisasi ketiga, dimulai dengan meninggalnya Jenderal Franco di Spanyol yang mengakhiri rezim otoriter di Eropa Selatan pada tahun 1975 ketika Raja Juan Carlos dibantu oleh Perdana Menteri Adolfo Suarez memperoleh persetujuan parlemen dan rakyat untuk menyusun konstitusi baru yang demokratis. Sekelompok perwira militer muda di Portugal melakukan kudeta kepada Marcello Caetano. Selama satu tahun, Portugal mengalami transisi dan akhirnya kelompok pro demokrasi menjadi pemenang. Tahun 1983 militer yang berkuasa di Turki mengundurkan diri dari perpolitikan. People Power di Filipina pada tahun 1986 menyebabkan Marcos jatuh. Oposisi di Korea tahun 1987 memenangkan pemilu. Hongaria menjadi multipartai pada tahun 1988. Partai Solidaritas pimpinan Walesa berhasil merubah Polandia menjadi negara non-komunis. Intervensi Amerika Serikat mengakhiri rezim Merxis-Leninis di Grenada pada 1983. Tahun 1990 di Uni Soviet lahirlah parlemen nasional yang bersifat non-komunis. Inilah awal dari perubahan di Uni Soviet.

Perubahan yang terjadi di Uni Soviet disebabkan oleh kebijakan Glasnost dan Perestroika yang digagas oleh Presiden Mikhail Gorbachev, yang selanjutnya menjadikan masyarakat bebas berpendapat, penghapusan sensorship terhadap pers, terungkapnya kisah perjalanan Uni Soviet, serta data tentang jumlah korban Perang Saudara, Perang Dunia II dan jumlah tawanan pada masa Stalin.

Demokratisasi di Uni Soviet terjadi pada tahun 1990-an. Diawali pada tahun 1989, pemilihan Kongres Nasional di Uni Soviet menyebabkan

kekalahan beberapa pemimpin senior partai komunis. Muncul juga sebuah parlemen nasional yang semakin berani mengeluarkan pendapatnya.²

Selain itu, dalam bidang kebudayaan dan seni, musik rock yang sebelumnya dianggap sebagai musik kapitalis mengalami perkembangan di masyarakat Uni Soviet. Kehidupan spiritual keagamaan merupakan salah satu yang tersentuh angin keterbukaan yang dihembuskan lewat Glasnost dan Perestroika. Dimulailah berbagai restorasi³ tempat-tempat beribadah dan tempat-tempat suci berbagai agama. Pada tahun 1988 bahkan diadakan peringatan secara besar-besaran 1000 tahun diadopsinya Kristen Ortodoks ke Rusia. Budaya Gereja Ortodoks, ritual-ritual dan perayaan hari besar keagamaan dikembalikan pada kehidupan masyarakat.⁴

Kebijakan Glasnost dan Perestroika yang dijalankan oleh pemerintah Gorbachev mempengaruhi gerakan separatisme yang semakin kuat. Munculnya gerakan dan partai politik seperti “Ruh” di Ukraina, “Sayudis” di Lithuania dan sebagainya menjadi pusat-pusat gerakan kemerdekaan republik-republik terhadap kekuasaan pusat. Di akhir tahun 1991, Uni Soviet runtuh dan menyisakan kepingan-kepingan negara-negara berdaulat. Negara-negara yang lepas dari Uni Soviet membentuk pemerintahan baru yang lebih

² *Ibid*, halaman 25

³ **res·to·ra·si** /réstorasi/ *n* pengembalian atau pemulihan kpd keadaan semula (tt gedung bersejarah, kedudukan raja, negara); pemugaran; **me·res·to·ra·si** *v* melakukan restorasi; mengembalikan atau memulihkan kpd keadaan semula; memugar: *Pemerintah akan ~ semua bangunan bersejarah*. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2012 di <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

⁴ A. Fakhruroji, *Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005, halaman 181

demokratis. Inilah yang terjadi setelah gelombang demokratisasi melanda Eropa Timur.

Pada akhir tahun 2010 di Timur Tengah⁵ terjadi peristiwa yang hampir serupa dengan gelombang demokratisasi di Eropa Timur pada tahun 1990. Sebelum tahun 2010, konflik yang muncul di Timur Tengah cenderung masalah perdamaian antara Israel dan Palestina. Tetapi dalam lingkup dua tahun belakangan ini (2010-2012) banyak terjadi pergolakan dan pemberontakan di negara-negara di kawasan Timur Tengah, yang membuat konflik Israel dan Palestina sedikit tersingkir dari pemberitaan di berbagai media massa di dunia. Pergolakan ini juga sering disebut Kebangkitan Arab, Pemberontakan Arab, Musim Semi dan Dingin Arab, atau Arab Spring, meskipun tidak semua negara yang bergejolak adalah bangsa Arab. Sebutan lainnya adalah *Jasmine Revolution* (Revolusi Melati). Suatu revolusi yang bertujuan untuk menumbangkan penguasa mereka yang dimulai dari Tunisia menyusul Mesir, Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya, dan negara-negara lainnya.⁶

Dimulai dari revolusi salah satu negara di bagian utara benua Afrika, Tunisia, pada 18 Desember 2010. Kesuksesan kerusuhan di Tunisia menjaral

⁵ Nama ini mulai diperkenalkan oleh para sarjana Eropa misalnya Mohan yang mencoba mengidentifikasi suatu wilayah yang menghubungkan antara benua Eropa dan Asia. Benua Eropa seringkali dirujuk dengan istilah Barat sedangkan Asia sering diistilahkan dengan Timur. Karenanya untuk menyebut wilayah tersebut Mohan menyebutnya dengan Timur Tengah. (Middle East Alfred Thayer Mahan dalam *Encarta Encyclopedia 2004 1993-2003 Microsoft Corporation*) diambil dari Surwandono, Sidiq Ahmadi. *Resolusi Konflik di Dunia Islam*. Jakarta: Graha Ilmu, 2011 halaman 123

⁶ Apriadi Tamburaka, *Revolusi Timur Tengah*, Yogyakarta, Narasi, 2011, halaman 9

ke negara-negara tetangga seperti Libya, Mesir, Suriah dan negara Timur Tengah lainnya.

Rakyat sipil Tunisia berhasil menumbangkan rezim Zine El Abidine Ben Ali, menyebabkan Perdana Menteri Ghannouchi menundurkan diri, pembubaran polisi politik, pembubaran dan pencairan semua aset RCD (*Rally Constitutional Democratic*) yang merupakan bekas partai berkuasa di Tunisia⁷, pembebasan tahanan politik, dan pemilihan Majelis Konstituante pada tanggal 23 Oktober 2011. Korban tewas dalam revolusi di Tunisia mencapai 223 jiwa.

Di Libya, pemberontakan dimulai pada tanggal 27 Desember 2010 yang mengakibatkan digulingkannya Moammar Khadafi yang akhirnya terbunuh pada tanggal 20 Oktober 2011⁸ dan pasukan oposisi menguasai kota-kota besar Libya. Pemberontakan perang saudara ini berakhir pada tanggal 23 Oktober 2011 dengan memakan korban sebanyak 32.000-40.000 jiwa.

Tidak berbeda dengan Tunisia dan Libya, Mesir juga bergejolak. Protes besar-besaran dimulai pada tanggal 25 Januari 2011 yang menyebabkan tergulingnya rezim Hosni Mubarak, pengunduran diri Perdana Menteri, pengambilalihan kekuasaan oleh angkatan bersenjata, penangguhan konstitusi, pembubaran parlemen, dan pengadilan Hosni Mubarak beserta keluarga dan

⁷ Tunisia Dissolves Ben Ali Party (9 Maret 2011) dalam <http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/03/20113985941974579.html> diakses pada tanggal 27 September 2012

⁸ Libya TV: Moammar Khadafy Tewas (20 Oktober 2011) dalam <http://internasional.kompas.com/read/2011/10/20/19465112/Libya.TV.Moammar.Khadafy.Tewas> diakses pada tanggal 27 September 2012

bekas menteri-menterinya. Revolusi Mesir menyebabkan 846 korban jiwa berjatuhan.

Suriah adalah negara selanjutnya yang terkena efek domino Arab Spring. Sampai saat ini (2012) kerusuhan masih terjadi. Dimulai sejak tanggal 15 Mei 2011, kerusuhan di Suriah sudah menyebabkan 9.045-11.300 korban jiwa, pembebasan beberapa tahanan politik, diakhirinya hukum darurat, pembubaran Gubernur Provinsi, pengunduran diri pemerintah, pembelotan dalam angkatan bersenjata, dan dihentikannya keanggotaan Suriah di Liga Arab untuk sementara waktu.

Kerusuhan-kerusuhan di negara-negara tersebut menyita perhatian dunia Internasional yang selama ini hanya memperhatikan konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Rakyat sipil di negara tersebut menginginkan perubahan pada pemerintahannya yang semula otoriter menjadi demokrasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, telah terjadi dua fenomena demokratisasi di wilayah yang berbeda dan waktu yang berbeda pula. Walaupun terjadi fenomena yang sama, yaitu gelombang demokratisasi, ada keunikan atau hal yang spesifik pada setiap fenomena demokratisasi tersebut. Hal ini bisa menimbulkan perbandingan antara kedua fenomena tersebut yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka muncul permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

“Bagaimana perbandingan dinamika gelombang demokratisasi Glasnost dengan Arab Spring?”

D. Landasan Teoritik

Teori berujud sekumpulan generalisasi dan karena di dalam generalisasi itu terdapat konsep-konsep, bisa juga diartikan bahwa teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis.⁹

Untuk menganalisa perbandingan gelombang demokratisasi Glasnost dan Arab Spring maka diperlukan teori-teori guna mengkajinya. Penulis menggunakan teori Efek Domino dari Noam Chomsky dan konsep Demokrasi.

1. Teori Efek Domino

Teori Efek Domino atau Teori Domino adalah sebuah analogi dengan cara di mana deretan domino jatuh berurutan sampai tidak ada yang berdiri lagi, teori domino itu sangat populer dengan pengambil keputusan di Amerika Serikat pada tahun 1950-an dan 1960-an, meskipun beberapa masih ingin mempertahankan daya meyakinkan tersebut pada saat ini.¹⁰

Teori Efek Domino sebenarnya berkaitan dengan kebijakan menteri luar negeri Amerika Serikat saat itu, John Foster Dulles, tentang teori pembendungan. Amerika Serikat khawatir terhadap penyebaran

⁹ Mohtar Mas'oeed (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. Halaman 186

¹⁰ The Penguin Dictionary of Hubungan Internasional, Graham Evans dan Jeffrey Newnham, 1998, Inggris, Penguin Books halaman 134

komunis pada tahun 1947 sehingga muncullah Teori Pembendungan (*Containment Theory*) untuk membendung perkembangan komunisme terutama di Eropa dan Jepang tetapi akhirnya teori ini berkembang di negara-negara Asia lainnya. Dalam buku karangan Noam Chomsky, ia melihat kebijakan-kebijakan Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Pada dasarnya, Teori Efek Domino melihat suatu kebijakan, di mana implikasi kebijakan tersebut tidak hanya berdampak terhadap satu hal, melainkan berbagi hal. Efek Domino mengacu pada suatu perubahan kecil, yang akan menyebabkan perubahan yang sama, yang kemudian akan menyebabkan perubahan lain yang sama, dan seterusnya dalam rangkaian atau rentetan yang linear, yang dianalogikan seperti jatuhnya barisan kartu domino hingga akhir. Efek Domino juga terkait dengan peristiwa berantai.

Efek Domino muncul pertama kali pada awal 1950-an oleh dengan gambaran saat Amerika Serikat khawatir terhadap penyebaran komunisme di Asia pada awal Perang Dingin. Efek Domino berpendapat bahwa jika satu negara Asia Tenggara menjadi Marxis maka ini akan memicu negara-negara tetangga untuk menjadi Marxis. Krisis internal di negara-negara Asia ditambah dengan saling ketergantungan mereka berarti bahwa revolusi Marxis atau pemberontakan akan terjadi dan menyebar.

Dasar implementasi Teori Efek Domino adalah spekulasi yang menyatakan bahwa jika suatu area dikuasai oleh komunisme, maka daerah-daerah atau negara-negara di sekitarnya akan terpengaruhi juga, setidaknya mengikuti negara tetangga mereka. Sebagaimana yang

dikatakan Presiden Eisenhower mengenai komunis di Indocina. Meskipun Eisenhower tidak menggunakan istilah Teori Domino secara langsung, namun ia disebut-sebut sebagai tokoh Teori Efek Domino ini. Eisenhower dalam konferensi pers tanggal 7 April 1954 berargumen bahwa jika pihak komunis berhasil mengambil alih seluruh Indocina, maka kelompok-kelompok lokal akan memiliki dorongan, dukungan materi dan momentum untuk mengambil alih Burma, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Jika hal ini terjadi, maka akan memberi keuntungan ekonomi dan geografis kepada komunis, dan hal ini akan berpengaruh terhadap ekonomi Amerika Serikat, karena kehilangan suatu wilayah atau region berarti kehilangan area perdagangan.

Hal ini kemudian menjadi pembenaran intervensi Amerika Serikat di seluruh dunia. Contoh implementasi kasus ini semasa Perang Dunia Kedua adalah agresi militer terhadap Vietnam, dengan alasan untuk mencegah Vietnam masuk dalam pengaruh komunis Uni Soviet. Alasan intervensi ini adalah negara komunis akan memberi dukungan dan bantuan bagi gerakan-gerakan revolusioner komunis di negara-negara tetangganya. Misalnya, Cina menyuplai Vietminh, tentara Vietnam Utara, berupa senjata dan pasukan. Jika Vietnam tidak dicegah, maka besar kemungkinan bahwa negara-negara tetangga atau bahkan kawasan Asia Tenggara akan tunduk dalam pengaruh komunis.

Dalam pandangan Chomsky, Teori Efek Domino bukan sekedar karena masalah menyebarkan komunisme, tetapi ini adalah strategi

perebutan area perdagangan. Ini berarti bukan sekadar masalah politik, tetapi juga ekonomi. Misalnya dalam kasus Indocina, jika rakyat Indocina merdeka, maka rakyat Thailand akan menuntut kemerdekaan dan keadilan pula, serta mungkin hal yang sama akan terjadi di negara-negara lainnya. Ini akan menyebabkan Amerika dan Sekutu akan kehilangan pasar. Dalam menjelaskan Teori Efek Domino ini, Chomsky seringkali menyebut istilah *The Threats of Good Example* atau ancaman dari para contoh yang bagus. Demokrasi merupakan peralatan yang tepat sebagai alasan implementasi teori ini. Tuduhan tidak demokratis suatu negara, yang pada akhirnya menjadi pembenaran agresi militer Amerika Serikat, di sisi lain menurut Chomsky tuduhan itu bisa jadi rekayasa belaka. Misalnya Guatemala yang berhasil melaksanakan reformasi agraria, dikhawatirkan menyebabkan negara-negara tetangganya seperti Honduras akan menerapkan hal yang sama. Ini akan merugikan ekonomi Amerika Serikat, sehingga Guatemala sebagai “contoh baik” menjadi ancaman yang harus segera diatasi.¹¹

Tahun 1990-an pada masa kepemimpinan Mikhail Gorbachev, negara-negara republik di Uni Soviet terkena efek domino demokratisasi yang terjadi akibat kebijakan Glasnost dan Perestroika. Beberapa negara, satu demi satu melepaskan diri dari negara induknya dan menyatakan merdeka dari negara komunis Uni Soviet. Negara-negara tersebut beralih ke arah demokrasi. Pada akhirnya Uni Soviet runtuh setelah gelombang

¹¹ Skripsi *Krisis Demokrasi dalam Kepemimpinan Neoliberalisme (Kritik Noam Chomsky terhadap Neoliberalisme)* oleh Purnami Safitri (20030510127) halaman 20-23

demokratisasi melanda negara-negara bagian Uni Soviet yang dulu dipimpin oleh Mikhail Gorbachev.

Teori ini juga bisa diimplementasikan dalam fenomena Arab Spring. Ketika pergolakan yang dimulai di Tunisia menyebar seperti kartu domino yang dijatuhkan, pergolakan ini menyebar ke negara-negara tetangga Tunisia seperti Mesir, Libya, Aljazair, dan lain-lain.

2. Konsep Demokrasi

Demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan awalnya berasal dari para filsuf Yunani. Konsep demokrasi sendiri dalam perkembangannya menjadi konsep yang paling ideal bagi sistem pemerintahan di suatu negara, karena dianggap lebih mengutamakan persamaan hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme. Secara umum demokrasi dapat dipahami sebagai “*The Government or Rule by the people*”, artinya rakyat yang berkuasa.¹² Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*Government of the people, by the people, for the people*).¹³

Demokratisasi merupakan suatu proses menuju demokrasi dan didefinisikan sebagai proses pergantian dari struktur politik otoriter

¹² Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya, Jilid 1*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992

¹³ Masdar, Ummarudin, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999

menjadi sistem politik yang kedaulatannya meluas dan dipraktekan oleh rakyat.¹⁴

Menurut Samuel P. Huntington, proses demokratisasi terbagi dalam beberapa proses, meliputi:¹⁵

- a. *Transformasi* (Reforma) yaitu proses demokratisasi terjadi ketika elit yang berkuasa memelopori perwujudan demokrasi.
- b. *Replacement* (Ruputura) yaitu proses demokrasi terjadi ketika kelompok oposisi memelopori proses perwujudan demokratisasi dan rezim otoriter tumbang atau digulingkan.
- c. *Transplacement* (Ruptforma) yaitu proses demokratisasi terjadi jika demokratisasi merupakan hasil tindakan bersama kelompok pemerintahan dan kelompok oposisi.
- d. Intervensi yakni proses demokratisasi yang dipaksakan oleh kekuatan asing dengan menumbangkan rezim otoriter yang sedang berkuasa.

Fenomena Glasnost dan Arab Spring memiliki persamaan, yaitu sama-sama bentuk dari gelombang demokratisasi. Tetapi dalam segi proses, kedua fenomena ini memiliki perbedaan.

Glasnost merupakan demokratisasi yang terjadi ketika elit yang berkuasa memelopori perubahan menuju demokrasi. Menurut Huntington, proses ini disebut *Transformasi*. Presiden Mikhail Gorbachev mengeluarkan kebijakan Glasnost dan Perestroika yang menyebabkan

¹⁴ Graeme Gill, *Liberalization and Demokratization in The Union and Russia, Democratization, Vol. 2 No. 3, Autumn, 1995, halaman 315*

¹⁵ Samuel P. Huntington, *Op.cit.* halaman 147

beberapa negara republik yang tergabung dalam Uni Soviet melepaskan diri dan mendirikan negara baru dengan sistem yang lebih demokratis.

Sedangkan fenomena Arab Spring disebut juga proses *Replacement* (Ruputura) yaitu proses demokrasi terjadi ketika kelompok oposisi memelopori proses perwujudan demokratisasi dan rezim otoriter tumbang atau digulingkan. Pergolakan yang terjadi di Timur-Tengah dipelopori oleh kelompok-kelompok oposisi yang menentang sistem pemerintahan otoriter di negaranya. *Replacement* terjadi di Tunisia dan Mesir. Sedangkan Libya mengalami Intervensi karena terlibatnya pihak asing dalam penggulingan rezim otoriter.

Menurut Gulermo O. Donnell, sebuah proses transisi menuju demokrasi ini dibutuhkan syarat yang harus dipenuhi yaitu:¹⁶

- a. Adanya keberhasilan *recovery of economy*.
- b. Keberhasilan kelompok-kelompok pembaharu dalam menduduki posisi-posisi penting dalam kekuasaan dari kelas menengah dan masyarakat sipil.
- c. Dukungan dari pihak-pihak luar yang berpengaruh dalam kebijakan ekonomi, politik dan keamanan suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Jika sarana tindakan pemaksaan dengan kekerasan dinetralkan. Jika negara itu memiliki suatu masyarakat yang majemuk, dinamis, dan modern.

¹⁶ Robert A. Dahl, *Op.cit.* halaman 86

- 2) Jika kekuasaan pemerintahan tidak hanya terpusat kepada kepala negara saja, tetapi wakil presiden atau perdana menteri tetap memiliki kekuasaan.
- 3) Adanya pemilu yang adil dan jujur.
- 4) Jika negara itu secara budaya homogen atau heterogen, tidak terbagi-bagi di dalam beberapa subkultur yang kuat dan berbeda atau jika terbagi-bagi seperti itu, para pemimpinnya harus berhasil dalam menciptakan satu tatanan konsosiasional untuk mengatur konflik-konflik subkultur.
- 5) Jika negara itu tidak mengalami intervensi dari pihak negara luar yang anti demokrasi.

Beberapa faktor penghambat proses demokratisasi menurut Samuel P. Huntington:¹⁷

- a. Politik merupakan sebuah penghalang yang secara potensial signifikan menghalangi perkembangan demokratisasi di negara-negara yang masih otoriter dan akan menjadi konservatif yang dengan gigih menentang demokratisasi. Konflik politik yang terjadi di antara elit juga berpengaruh terhadap pelaksanaan demokrasi, sebab jika elit tidak solid, demokrasi juga sulit terlaksana.
- b. Budaya yaitu tradisi budaya yang sangat bervariasi dan tidak demokratis, tentunya akan menghambat penyebaran norma-norma demokrasi di dalam masyarakat, yang tentunya tidak akan memberikan

¹⁷ Samuel P. Huntington, *Op.cit.* halaman 381-404

legitimasi yang kuat pada lembaga-lembaga demokrasi tersebut secara efektif.

- c. Ekonomi yaitu kemiskinan juga merupakan penghalang demokratisasi di suatu negara, karena demokrasi sangat tergantung pada perkembangan ekonomi suatu negara.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transisi menuju demokrasi menurut Gulermo O. Donnell dan faktor penghambat proses demokratisasi menurut Samuel P. Huntington yang telah dijelaskan di atas dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan transisi demokrasi di suatu negara. Uni Soviet dalam perjalanan demokrasinya tidaklah mulus. Selama kepemimpinan Mikhail Gorbachev, demokrasi tidak pernah terwujud sepenuhnya. Kekuasaan dan kekuatan presiden sangat mendominasi. Sehingga transformasi politik yang dilakukan Gorbachev tidak terwujud dan justru mengarah kepada hancurnya Uni Soviet.

Sedangkan di kawasan Timur Tengah, beberapa negara-negara yang terkena efek domino demokratisasi sukses menjatuhkan para pemimpin otoriter. *Replacement* yang dilakukan para kelompok oposisi berhasil dan negara-negara tersebut membuat sistem baru yang lebih demokratis. Contoh negara-negara tersebut adalah Tunisia dan Mesir di mana kelompok oposisi berhasil menjatuhkan rezim Ben Ali dan Hosni Mubarak. Selain Tunisia dan Mesir, kelompok oposisi di Libya juga berhasil menggulingkan rezim Muammar Khadafi dengan bantuan pihak asing.

E. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teoritik yang telah dipaparkan, maka dapat diperoleh hipotesa atau jawaban sementara dari perbandingan dinamika gelombang demokratisasi Glasnost dengan Arab Spring dapat dibandingkan dalam hal proses perubahan demokratisasi, kecepatan atau rentang waktu, dan efek demokratisasi.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Penulis melengkapi data dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang telah dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dan literatur-literatur yang relevan seperti buku-buku panduan, data elektronik (internet), dan data lainnya yang berhubungan dengan rumusan masalah.

2. Metode Pengolahan Data

Penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode deduktif yaitu membuktikan suatu teori dengan unit analisisnya adalah nation-state (negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Uni Soviet serta negara-negara pecahannya). Sedangkan dari segi pendekatan, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang hanya menampilkan atau menggambarkan fakta-fakta yang terjadi. Selain itu, penulis juga menggunakan tabel untuk mengolah data.

Tabel Perbandingan Glasnost dan Arab Spring

| No. | Aspek | Glasnost | Arab Spring | | |
|-----|--------------------------------|------------|-------------|-------|-------|
| | | Uni Soviet | Tunisia | Mesir | Libya |
| 1. | Proses perubahan demokratisasi | | | | |
| 2. | Kecepatan atau rentang waktu | | | | |
| 3. | Efek demokratisasi | | | | |

G. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berjudul “PERBANDINGAN DINAMIKA GELOMBANG DEMOKRATISASI GLASNOST (1990-AN) DAN ARAB SPRING (2010-AN)” bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan dinamika gelombang demokratisasi Glasnost dan Arab Spring.

H. Batasan Penelitian

Untuk menghindari adanya pelebaran penjelasan mengenai dinamika Glasnost dan Arab Spring maka dibutuhkan batasan penelitian. Adapun batasan penelitian ini adalah fenomena Glasnost pada tahun 1990 di kawasan Eropa Timur dengan objek Uni Soviet dan negara-negara pecahannya dan

fenomena Glasnost di kawasan Timur Tengah pada tahun 2010 dengan objek negara Tunisia, Mesir dan Libya.

I. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teoritik, hipotesa, metode penulisan, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II akan membahas mengenai fenomena Glasnost 1990 yang merupakan proses demokrasi.

BAB III akan membahas mengenai fenomena Arab Spring 2010 yang merupakan proses demokrasi.

BAB IV akan membahas mengenai perbandingan gelombang demokratisasi Glasnost 1990 dengan Arab Spring 2010 dengan menampilkan keunikan setiap fenomena demokrasi tersebut.

BAB V merupakan kesimpulan atau penutup dari keseluruhan bab yang telah dibahas, berisi ringkasan singkat tentang penelitian yang disusun oleh penulis dari seluruh hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.